

**EKSISTENSI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ERA UU No. 22 Thn. 1999 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH
(STUDI DESKRIPSI DPRD KOTA SURABAYA)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Diajukan oleh :

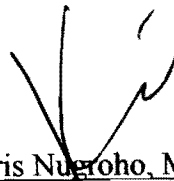
HELPING FEBRIANTO DAELI
NIM : 079615249

**KEPADA
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Setuju untuk diujikan

Surabaya, 21 Juni 2002

Dosen Pembimbing :

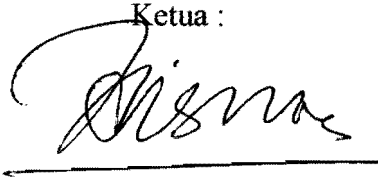


Drs. Kris Nugroho, MA
NIP. : 131 801 408

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji pada tanggal 8 Juli 2002

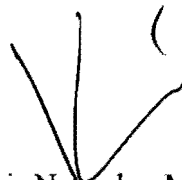
Panitia penguji terdiri dari :

Ketua :



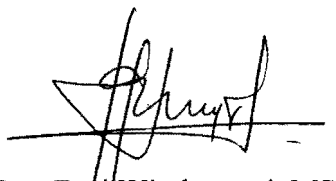
Drs. Wisnu Pramutanto, MSi
NIP. : 131 453 124

Anggota :



Drs. Kris Nugroho, MA
NIP. : 131 801 408

Anggota :



Dra. Dwi Windyastuti, MS
NIP. : 131 801 643

ABSTRAK

Eksistensi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah secara praktis adalah sebagai lembaga legislatif di daerah. DPRD berfungsi di dalam membuat peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan daerah.

Sistem pemerintahan yang demokratis menuntut adanya peran serta dan keterlibatan masyarakat di dalam proses-proses pembuatan kebijakan, dan DPRD sebagai dibentuk untuk mewakili masyarakat. Namun pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD tidak dilaksanakan secara optimal. Keterbatasan sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), adanya dominasi pihak eksekutif daerah dan pola rekrutment di DPRD merupakan faktor-faktor yang mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan fungsi badan perwakilan tersebut. DPRD cenderung hanya sebagai alat legitimasi eksekutif daerah di dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan di daerah.

Sistem pemerintahan daerah yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan menjelaskan bagaimana eksistensi DPRD dalam pemerintahan daerah. UU tersebut mengatur kedudukan, hak dan kewajiban, dan kewenangan DPRD. Perubahan-perubahan kedudukan, hak dan kewajiban, dan kewenangan DPRD dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah secara tidak langsung mempengaruhi fungsi dan eksistensi DPRD dalam pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD tidak lagi hanya sebagai lembaga pemberi saran dan pengawas yang pasif, tetapi menjadi lembaga yang dapat menentukan arah kebijakan, pembangunan daerah dan melakukan pengawasan sekaligus pengontrol yang aktif.

Di dalam UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah fungsi DPRD dapat dikategorikan dalam tiga bagian penting, yaitu: fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi sosialisasi politik. Dan ketiga fungsi ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat daerah sesuai dengan keinginan untuk melaksanakan demokratisasi di daerah.

Implementasi fungsi dan kewenangan DPRD di dalam UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dapat menjelaskan eksistensi DPRD di dalam pemerintahan daerah. Ketika DPRD Kota Surabaya memutuskan dan menetapkan Tata Tertib DPRD Kota Surabaya, DPRD memutuskan untuk mengemban dan melaksanakan fungsi-fungsi yang dibebankan kepadanya.